

Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut, Didukung Stimulus Kebijakan dan Kerja Sama Internasional

Perekonomian global selama 2021 melanjutkan perbaikan, didukung berbagai respons kebijakan dan kerja sama internasional, meski dengan laju yang tidak merata antara negara maju dan negara berkembang.

Perbaikan ekonomi didorong oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan. Kerja sama internasional di berbagai fora juga memberikan dukungan dalam mempercepat pemulihan perekonomian dunia melalui berbagai inisiatif. Namun laju pertumbuhan ekonomi mengalami divergensi antarnegara akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan besaran stimulus. Kapasitas vaksinasi dan stimulus kebijakan yang lebih baik menjadikan pemulihan ekonomi negara maju relatif lebih cepat daripada negara berkembang.

Pada paruh pertama 2021, perekonomian global secara umum melanjutkan tren perbaikan, setelah berkontraksi sangat dalam pada triwulan II 2020.

Pada triwulan I 2021, perekonomian AS berhasil keluar dari zona kontraksi, sementara Tiongkok dan India melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok triwulan I 2021 bahkan mencapai 18,3%, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan jasa seiring normalisasi aktivitas masyarakat, kenaikan permintaan ekspor, ekspansi industri, serta *base effect*. Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi makin kuat terutama di AS (12,2%), Kawasan Euro (14,2%), Jepang (7,6%), dan India (20,1%). Selain dipengaruhi oleh dukungan stimulus kebijakan dan percepatan vaksinasi, kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh faktor *base effect* sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 yang sangat rendah.

Perekonomian global kemudian tumbuh melambat dan berada di bawah prediksi pada triwulan III 2021 akibat penyebaran COVID-19 varian Delta dan hambatan suplai. Kasus infeksi varian Delta yang

meluas di berbagai kawasan, kembali menyebabkan penerapan pembatasan mobilitas. Restriksi ketat diberlakukan, terutama di Tiongkok yang menerapkan 'zero COVID strategy.' Restriksi di beberapa negara Asia telah menambah permasalahan hambatan suplai, termasuk semikonduktor. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 tertahan, antara lain di AS, Kawasan Euro, Jepang dan Tiongkok. Pemulihan ekonomi juga menghadapi tantangan kelangkaan energi yang meningkatkan harga komoditas energi global.

Setelah sempat tertahan pada triwulan III, pemulihan ekonomi global untuk keseluruhan 2021 diperkirakan berlanjut, kendati dengan laju pertumbuhan yang sedikit lebih lambat daripada perkiraan sebelumnya.

Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi global 2021 menjadi 5,7%, dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,8%. IMF juga merevisi *outlook* pertumbuhan ekonomi global menjadi 5,9% pada *World Economic Outlook* Oktober 2021 (dari perkiraan Juli 2021 sebesar 6%). Ke depan, pemulihan ekonomi dunia diperkirakan masih berlanjut. IMF memperkirakan PDB global pada 2022 akan tumbuh sebesar 4,9%.

Laju inflasi global cenderung meningkat. Tekanan inflasi diperkirakan akan berada pada level tinggi dalam durasi yang lebih lama daripada perkiraan awal akibat kendala suplai dan kenaikan harga komoditas. *Consumer price index* (CPI) AS dan Kawasan Euro telah berada di atas target. Inflasi di negara lain seperti Tiongkok dan India juga telah meningkat. Potensi kenaikan inflasi ke depan tetap perlu dicermati, terutama jika hambatan suplai berlanjut. IMF memperkirakan inflasi global 2021 lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, dan akan menurun pada 2022.

Divergensi pemulihan ekonomi dan perbedaan tekanan inflasi direspons dengan kebijakan yang berbeda oleh setiap negara.

Sejumlah bank sentral telah meningkatkan suku bunga kebijakan untuk merespons kenaikan inflasi, seperti Bank Sentral Brasil, Meksiko, Selandia Baru, Hongaria, dan Rusia. Sementara itu, The Fed dan ECB masih mempertahankan suku bunga, tetapi telah menurunkan ekspansi likuiditas. Namun, the Fed telah menurunkan pembelian aset secara bertahap mulai November 2021. Demikian pula dengan ECB yang telah menetapkan pembelian aset dalam kerangka *Pandemic Emergency Purchase Programme* dengan jumlah yang lebih rendah hingga Maret 2022, tetapi meningkatkan jumlah pembelian aset dalam kerangka *Asset Purchase Programme*. Divergensi pemulihan ekonomi antarnegara menyebabkan perbedaan *timing* normalisasi kebijakan moneter antarnegara yang dapat menyebabkan dampak *spillover* negatif pada negara *emerging*. Dari sisi kebijakan fiskal, secara umum berbagai negara masih mempertahankan *stance* kebijakan yang akomodatif, bahkan AS menambah stimulus *Infrastructure Bill*.

Prospek pemulihan ekonomi global diperkirakan masih akan dihadapi pada berbagai faktor risiko.

Dunia perlu mencermati berbagai risiko, seperti varian baru COVID-19, *supply-demand mismatches*, tekanan kenaikan harga, normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan, risiko perubahan iklim, serta ketegangan perdagangan dan teknologi. Selain itu, perlu dicermati *scarring effect* dari dampak pandemi pada sektor tenaga kerja dan pendidikan yang dapat menurunkan produktivitas.

Melalui berbagai fora kerja sama internasional, negara-negara di dunia berkomitmen mengatasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi global.

Diskusi pada fora kerja sama internasional diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan perekonomian global, serta merumuskan respons kebijakan yang tepat. IMF-WB *Annual Meeting* 2021 menekankan urgensi untuk melaksanakan kebijakan yang dapat mengatasi dan membatasi dampak pandemi (*scarring effect*) serta mendukung transformasi ekonomi global. Dengan tema *Vaccinate,*

Calibrate, Accelerate, IMF mendorong kerja sama global untuk mempercepat vaksinasi, menyesuaikan respons kebijakan dengan perkembangan pandemi, dan mendukung transformasi ekonomi global untuk mencapai pemulihan yang inklusif, lebih hijau, dan berbasis digital. G20 di bawah Presidensi Italia pada tahun 2021 juga berkomitmen mendukung respons kebijakan terhadap pandemi, mengarahkan koordinasi ekonomi internasional menuju pemulihan, serta mempersiapkan dunia pascapandemi. Sejalan dengan itu, ASEAN juga berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di kawasan.

IMF mengeluarkan inisiatif untuk membantu negara miskin yang terilit utang dan menambah alokasi *Special Drawing Rights (SDR)* sebagai tambahan cadangan devisa bagi negara anggota.

IMF membantu negara miskin melalui pemberian *concessional loans* dan program penghapusan utang. Indonesia mendukung inisiatif tersebut dan berpartisipasi pada program penghapusan utang Sudan. Untuk menambah likuiditas global dalam upaya mengatasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi, IMF juga menambah alokasi SDR sebesar USD650 miliar (sekitar SDR456 miliar) yang didistribusikan kepada seluruh negara anggotanya secara proporsional sesuai kuota masing-masing negara. Atas alokasi tersebut, Indonesia menerima tambahan SDR sebesar SDR4,46 miliar atau setara dengan USD6,31 miliar yang digunakan untuk menambah cadangan devisa negara.

Indonesia akan menjalankan peran strategis sebagai Presidensi G20 pada 2022.

Dengan tema "*Recover Together, Recover Stronger*" Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan yang keberlanjutan dan inklusif. Presidensi G20 Indonesia memiliki enam agenda prioritas pada jalur keuangan, yaitu *Exit Strategy to Support Recovery, Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth, Payment Systems in the Digital Era, Sustainable Finance, Digital Financial Inclusion,* dan *International Taxation*.

Dalam konteks kerja sama bilateral, Bank Indonesia telah melakukan berbagai dialog dengan sejumlah bank sentral negara mitra. Kerja sama ditujukan untuk membangun dan menjaga hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, serta memperjuangkan kepentingan BI dan/atau perekonomian Indonesia. Pada 2021, dialog antara lain dilakukan dengan Bank Sentral Swiss, Singapura, Arab Saudi, Sri Lanka, dan Jepang, dimana telah dilakukan pertukaran pandangan mengenai perkembangan perekonomian terkini, serta peninjauan dan penguatan kerja sama bilateral antarbank sentral.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional pada sektor keuangan dan perdagangan. ASEAN+3 telah meningkatkan porsi fasilitas Chiang Mai *Initiative Multilateralization* yang dapat ditarik tanpa didahului dengan aktivasi fasilitas IMF (*CMIM IMF De-Linked Portion*) dari 30% menjadi 40%. Bank Indonesia kembali memperpanjang kerja sama *Bilateral Swap Arrangement* dengan Jepang, serta kerja sama *Local Currency Bilateral Swap Agreement* dan *Bilateral Repo Line* dengan Monetary Authority of Singapore. Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi, Bank Indonesia melakukan penguatan implementasi

kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) dengan Bank Negara Malaysia, Japan Ministry of Finance, serta mengimplementasikan kerja sama LCS baru dengan People's Bank of China. Dalam konteks kerja sama perdagangan, Indonesia melanjutkan perundingan perjanjian perdagangan bilateral dengan beberapa negara mitra, antara lain Uni Eropa, Chili, dan Uni Emirat Arab. Indonesia juga terus mempererat integrasi jasa keuangan dan *e-commerce* dengan negara ASEAN dan mitra ASEAN, serta aktif dalam perundingan World Trade Organization.

Berbagai kebijakan yang ditempuh Indonesia dalam mengatasi pandemi telah mendapat tanggapan positif dari lembaga pemeringkat dan organisasi internasional. Indonesia dapat mempertahankan *Sovereign Credit Rating* pada 2021, yang mencerminkan keyakinan lembaga pemeringkat terhadap kredibilitas kebijakan dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Sejalan dengan itu, IMF menilai positif sinergi kebijakan Indonesia dalam menghadapi pandemi sebagaimana dituangkan dalam laporan IMF *Article IV Consultation 2020*. Pandangan serupa juga disampaikan oleh OECD dan AMRO. Secara khusus, AMRO menilai perekonomian Indonesia tetap tangguh dan *resilient* meski menghadapi tantangan pandemi COVID-19.

